

**IMPLEMENTASI SISTEM GEOSPASIAL KOMPUTERISASI DALAM
UPAYA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN
DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara FIS
UNP Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Serjana Administrasi Publik*



Oleh :

DENA HARYANI

TM/NIM : 2016/16042003

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Sistem Geospasial Komputerisasi Dalam
Upaya Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan
Di Badan Badan Pertanahan Nasional Kota Padang

Nama : Dena Haryani

NIM/TM : 16042003/ 2016

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 20 Oktober 2020

**Disetujui oleh,
Pembimbing**



Aldri Frinaldi, SH, M. Hum, Ph.D
NIP. 197002121998021001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari Selasa, 20 Oktober 2020 Pukul 14:00 WIB s/d 15:00 WIB

**Implementasi Sistem Geospasial Komputerisasi Dalam Upaya Mewujudkan
Tertib Administrasi Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional
Kota Padang**

Nama : Dena Haryani
NIM/TM : 16042003/ 2016
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 20 Oktober 2020

Tim Penguji

	Nama
Ketua	Aldri Frinaldi, SH, M. Hum, Ph. D
Anggota	Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D
Anggota	Dr. Zikri Alhadi, S.IP., MA

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 

Mengesahkan
Dekan FIS UNP



Dr. Siti Fatimah, M. Pd., M.Hum.
NIP. 19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dena Haryani
NIM/TM : 16042003/ 2016
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Sistem Geospasial Komputerisasi Dalam Upaya Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang”** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 20 Oktober 2020

Saya yang menyatakan,



Dena Haryani

2016/16042003

ABSTRAK

Judul : Implementasi Sistem Geospasial Komputerisasi Dalam Upaya Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang

Penulis : Dena Haryani

BP/NIM : 2016/16042003

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Pembimbing: Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem aplikasi geospasial komputerisasi (GeoKKP) dalam upaya tertib administrasi pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan, kendala, serta upaya dalam penggunaan aplikasi geospasial komputerisasi kantor pertanahan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 variabel yaitu implementasi sistem geospasial komputerisasi kantor pertanahan dan tertib administrasi pertanahan. Data yang penulis dapatkan melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Dengan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam pendataan dalam pemilihan informan antara lain kepada masyarakat, pegawai fungsional, serta kepala bidang infrastruktur Badan Pertanahan Nasional Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat diketahui bahwa beberapa kendala yang menyebabkan sistem aplikasi geospasial komputerisasi kantor pertanahan belum terimplementasi dengan baik. kendala yang penulis temui dalam penerapan sistem aplikasi geospasial komputerisasi (GeoKKP) dalam upaya tertib administrasi pertanahan di badan pertanahan nasional kota padang antara lain: komunikasi yang kurang baik, sumber daya manusia (SDM), sistem jaringan kurang stabil, dan kurangnya komitmen antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan tersebut.

Kata kunci: Implementasi Geokkp, kendala, Tertib administrasi pertanahan.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : *Implementasi Sistem Geospasial Komputerisasi Dalam Upaya Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang*. Tidak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terimakasih kepada :

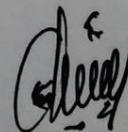
1. Ibuk Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Prof. Drs. Dasman Lanin., M.Pd., Ph.D selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan saran kepada penulis.
3. Bapak Aldri Frinaldi, S.H., M.Hum., Ph.D Selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dan sekaligus dosen pembimbing yang sudah membimbing dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Drs. Syamsir, M.Si. Selaku dosen penguji I yang telah memberikan kritik, saran dan tambahan agar penelitian penulis lebih baik.
5. Bapak Dr. Zikri Alhadi, S.IP., M.A selaku penguji II yang telah memberikan kritik dan saran kepada penulis.
6. Bapak Hidayatul Fajri, S.AP., MPA selaku dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah membantu penulis dalam mengecek turnitin artikel.

7. Staf dosen beserta pegawai Jurusan Administrasi yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis dalam perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi.
8. Staf karyawan dan karyawan perempuan kepastakaan dan staf administrasi Jurusan Administrasi Publik Universitas Negeri Padang.
9. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang yang telah memberikan izin untuk penelitian ini.
10. Teristimewa untuk Kedua orang tua tercinta dan tersayang, bapak Dahri dan ibu Ratmawati, wo, dan abg yen yang telah memberikan dukungan penuh, Do'a yang tiada henti, dan selalu kebersamai dalam keadaan sulit. Terimakasih banyak atas semua perjuangan serta kasih sayang yang diberikan untuk penulis, jasa kalian tidak akan bisa terbalaskan sampai kapanpun.
11. Keluarga Besar nangguk pandak dan tinu mbuk yang telah memberikan do'a, motivasi, dan dukungan baik secara moril maupun materil kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teruntuk orang yang spesial Ego Andesra yang telah memberikan Do'a, semangat, dan dukungan kepada penulis. Terimakasih banyak untuk semua ini. Semoga niat baik kita segera terkabul.
13. Sahabat tersayang Eva Guspita, S.Pd yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis, yang tetap kebersamai dalam keadaan sulit. Terimakasih telah menjadi sahabat, kakak, ibu yang baik untuk penulis. Sahabat tersayang Sintia Aryanti S.Pd dan Amelina Artati S.H (*coming soon*) yang telah memberikan semangat dan Do'a untuk penulis.

14. Quh cik kebboh Squad, Rini Nanda Putri, S.AP yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Rima Arfa Solia, S.AP, Yorenza, S.AP, Susi Suryatni, S.AP, Rahmawati Firdaus, S.AP, Rici Desriana, S.AP (*coming soon*) yang telah memberikan semangat dan Do'a untuk penulis dalam penyelesaian skripsi. Terimakasih telah membuat perkuliahan dena semakin berwarna, semoga kita semua sukses kedepannya. Buat kalian cik-cik kuhh semangat ya, semua akan indah pada waktunya.
15. Miftahul Jannah, SP.d (imif) dan Fitri Cahyanti SP.d (*coming soon*), Zilqistiyah, S.AP yang telah memberikan semangat dan dukungan serta Do'a untuk penulis dalam penyelesaian skripsi.
16. Seluruh rekan-rekan Jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2016 yang telah kebersamai dalam perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan penelitian ini. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis yang masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis menyampaikan permohonan maaf dan mengharapkan adanya kritik dan saran dari dosen penguji serta pembaca demi sempurnanya penelitian ini. Terima kasih

Padang, 20 Oktober 2020



Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Pembatasan Masalah.....	12
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	15
1. Konsep Implementasi Kebijakan.....	15
2. Konsep <i>Elektronik Government</i>	30
3. Konsep Sistem Informasi Manajemen	35
4. Konsep Administrasi dan Tertib Administrasi Pertanahan.....	40
5. Konsep aplikasi GeoKKP.....	49
B. Penelitian yang Relevan	57
C. Kerangka Konseptual.....	58

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	60
B. Lokasi Penelitian.....	60
C. Informan Penelitian.....	61
D. Jenis Dan Sumber Data.....	61
E. Teknik Pengumpulan Data	63
F. Teknik Keabsahan Data.....	64
G. Teknik Analisis Data.....	65

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum.....	68
B. Temuan Khusus.....	73
C. Pembahasan.....	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....104

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Informan Penelitian.....	60
Tabel 4.1	Analisis Data.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model implementasi kebijakan G.C. Edward III.....	22
Gambar 2.2 Halaman Depan Aplikasi GeoKKP.....	51
Gambar 2.3 Peta Bidang Tanah.....	52
Gambar 2.4 Penggambaran Bidang.....	52
Gambar 2.5 Integritas Bidang.....	52
Gambar 2.6 NIB.....	53
Gambar 2.7 Plotting Peta.....	54
Gambar 2.8 Cetak Bidang Peta.....	54
Gambar 2.9 Tutup.....	55
Gambar 2.10 Kerangka Konseptual.....	58
Gambar 4.1 Peta Administratif Kota Padang.....	67
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPN Kota Padang.....	71
Gambar 4.3 Tampilan Depan Aplikasi <i>GeoKKP</i>	75
Gambar 4.4 Ruang Kerja Pegawai Bidang Infrastruktur.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Era Globalisasi saat ini perkembangan dunia usaha mengalami kemajuan yang begitu pesat, yang ditandai dengan penggunaan mesin-mesin modern dan sarana-sarana Telekomunikasi yang canggih didalam kegiatan usaha. Hal ini akan meningkatkan kebutuhan terhadap informasi yang akurat bagi manajemen guna membantu dalam hal pengambilan keputusan untuk kemajuan perusahaan. Teknologi informasi secara signifikan sangat dibutuhkan oleh masyarakat salah satunya adalah sistem informasi berbasis online. Perkembangan teknologi saat ini tidak hanya digunakan oleh instansi swasta namun juga diserap oleh instansi publik, dalam hal ini bisa kita lihat dan kita perhatikan dari berbagai macam bentuk layanan yang diberikan. Hal ini pun memberikan pemahaman kepada kita bahwa instansi-instansi di Indonesia sudah menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan zaman.

Penerapan teknologi informasi yang paling pesat saat ini adalah penggunaan internet. Dilansir dari laman berita online Detik.com (terakhir akses 16/06/2020 pukul 03:20 Wib) dapat dilihat bahwa data pengguna internet pada tahun 2018 meningkat menjadi 27,9 Juta dan rata-rata adalah kaum milenial. Secara tidak langsung dari data tersebut kita bisa melihat bahwa internet merupakan salah satu cara terbaik dalam melakukan pendekatan pada masyarakat. Alasan tersebutlah yang semakin menjadi

dorongan bagi instansi untuk menghasilkan berbagai layanan masyarakat berbasis internet.

Sistem informasi manajemen merupakan salah satu ilmu yang cukup terdampak akibat perkembangan teknologi. Secara sederhana sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem berbasis komputer yang dapat digunakan untuk menghasilkan suatu informasi dari data yang sudah diinput dan diolah sebelumnya (Aldri, 2014). Dari pengertian sederhana tersebut dapat kita lihat bahwa informasi yang dihasilkan tersebut merupakan hasil dari pengolahan data yang sudah ada, informasi tersebut pun akan diperbaharui setiap saat dan dapat diakses kapan saja oleh pengguna. Keadaan seperti itupun tentunya akan sangat sesuai dengan keadaan masyarakat yang sudah menggunakan internet dalam kehidupan sehari-harinya.

Dewasa ini penggunaan sistem informasi manajemen sangat mudah untuk kita jumpai. Umumnya semua instansi baik swasta maupun instansi publik sudah menerapkan hal tersebut dalam berbagai kegiatannya. Ada banyak bidang yang menggunakan sistem informasi manajemen dalam pelaksanaan pekerjaan seperti dalam pengelolaan surat menyurat, manajemen pegawai bahkan hingga pengurusan hal-hal yang lebih khusus lainnya. Semua itu dapat terjadi karena sistem informasi manajemen sangat membantu dalam berbagai hal salah satunya adalah membantu dalam proses pengambilan keputusan oleh pimpinan (Rizan, 2013:409).

Badan pertanahan nasional adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas

pemerintah dibidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang terletak di Jalan Ujung Gurun No.1 Ujung Gurun, Purus, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Salah satu tugasnya adalah Melayani setiap urusan administrasi pertanahan yang ada di Kota Padang.

Salah satu fungsi BPN adalah memberikan pelayanan administrasi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak BPN. Sebelum menerapkan sistem informasi manajemen ini segala kegiatan instansi dilakukan secara manual atau belum melibatkan teknologi informasi. Namun seiring perkembangan teknologi dan tuntutan pembaharuan maka lahirlah berbagai bentuk produk baru dari instansi tersebut. Salah satu bentuk sistem aplikasi Geo KKP yang hanya bisa diakses oleh pejabat fungsional BPN bidang infrastruktur. Aplikasi Geospasial Komputerisasi Kantor Pertanahan (*GeoKKP*) yang bertujuan untuk membantu mengurangi masalah pertanahan dan menciptakan Sistem Informasi dan Manajemen Kantor Pertanahan yang baik sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 mengenai :

“Informasi Geospasial sangat berguna sebagai sistem pendukung pengambilan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan nasional, khususnya dalam pengelolaan data pertanahan”.

Aplikasi Geospasial Komputerisasi Kantor Pertanahan (*GeoKKP*) merupakan suatu aplikasi yang diambil dari Sistem Informasi Geografis (SIG),

yang digunakan untuk menghubungkan data spasial dan data tekstual ke dalam suatu sistem lalu disimpan ke dalam server Kantor Pertanahan. Salah satu data spasial yang digunakan dalam *updating* peta pendaftaran yaitu peta analog yang kemudian diinventerisasi berdasarkan nama desa dan tahun, setelah itu lakukan *scanning* peta dan pendigitasian peta yang kemudian diimport dan dijadikan peta tunggal yang telah terstandarisasi BPN. Sedangkan pada data tekstual yang digunakan adalah Surat Ukur (SU) dan Buku Tanah (BT). Surat Ukur merupakan dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian dan Buku Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya. Dari jenis data tersebut, informasi yang dimasukkan dalam Geo KKP ini seperti Nomor dan tanggal Surat Ukur, NIB, luas, alamat persil, nama pemilik, jenis dan Nomor hak, asal persil, dan histori kepemilikan.

Tertib administrasi pertanahan merupakan salah satu sasaran dari catur tertib pertanahan yang ditentukan dalam Tap MPR Nomor IV/MPR/1978 sebagai dijadikan landasan dan sekaligus sasaran untuk mengadakan penataan kembali penggunaan dan pemilikan tanah serta program-program dibidang pertanahan dalam rangka terwujudnya tanah kesejahteraan dan keadilan rakyat indonesia. tertib administrasi pertanahan dapat terwujud dengan dilaksanakannya pendaftaran tanah, sehingga setiap bidang tanah telah tersedia catatan mengenai aspek-aspek ukuran fisik, penguasaan, penggunaan, jenis hak

dan kepastian hukumnya, yang dikelola dalam sistem informasi pertanahan yang lengkap. (Ana silviana, Mira novanna :2018-283)

Mengingat pentingnya peran tanah, berdasarkan Tap MPR Nomor IV/MPR/1978 ditentukan agar pembangunan dibidang pertanahan diarahkan untuk menata kembali penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah. Atas dasar tap MPR No IV/MPR/1978, presiden mengeluarkan kebijaksanaan dibidang pertanahan yang dikenal dengan catur tertib bidang pertanahan yang diarahkan pada program : mempercepat proses pelayanan yang menyangkut urusan pertanahan, menyediakan peta data penggunaan tanah, penyusunan data dan daftar pemilik tanah, menyempurnakan daftar-daftar kegiatan dikantor agraria, dan mengusahakan pengukuran tanah dalam rangka pensertifikatan hak atas tanah.

Dibidang pertanahan layanan administrasi pertanahan merupakan bentuk komitmen agar pertanahan didasarkan atas data yang valid dan akurat. Terbatasnya sistem informasi bidang pertanahan selama ini sangat menghambat pelayanan kepada masyarakat yang akan melakukan perbuatan hukum dengan tanah yang bersangkutan. Masalah yang sering muncul diantaranya sertifikat ganda, sengketa batas dan sengketa kepemilikan, serta belum terpetakan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar dalam satu peta.

Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pertanahan, meningkatkan dan mempercepat pelayanan dibidang pertanahan, meningkatkan kualitas informasi pertanahan, mempermudah pemeliharaan data pertanahan, menghemat *space/storage* untuk

penyimpanan data-data pertanahan dalam bentuk digital (*paperless*), meningkatkan kemampuan SDM pegawai, melakukan standarisasi data dan sistem informasi dalam rangka mempermudah pertukaran informasi pertanahan serta menciptakan suatu sistem informasi pertanahan yang handal dalam. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem aplikasi Geo KKP ini adalah jembatan menuju tertib administrasi pertanahan yang lebih baik. (Juliasti Surdin, 2016:188).

Aplikasi Geo KKP ini merupakan salah satu aplikasi yang dirancang untuk pegawai untuk mempermudah pekerjaannya. Aplikasi ini juga dinilai sangat efektif dan efisien yang mampu mempersingkat waktu dalam penginputan data, ruang penyimpanan yang sedikit dan praktis dalam penggunaannya. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan ibu Riska salah satu staf Badan Pertanahan Nasional Kota Padang pada tanggal 20 Februari 2020 :

“aplikasi Geospasial komputerisasi Kantor Pertanahan diharapkan bisa memberikan kemudahan bagi pegawai, karena aplikasi ini dinilai lebih memudahkan pegawai dalam menginput data-data yang berkaitan dengan pertanahan. Selain itu, aplikasi ini lebih efektif dan efisien serta menghemat waktu dalam proses penginputan data tersebut. Sebelum adanya sistem geo KKP ini, kami menginput data secara manual dan membutuhkan waktu yang lama.”

Kemudian pada tanggal 17 Maret 2020 peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Agung salah satu staf bidang infrastruktur pertanahan yang menggunakan aplikasi tersebut, beliau mengatakan :

“...Aplikasi GeoKkp ini digunakan oleh pegawai bagian infrastruktur pertanahan dengan tujuan untuk memudahkan pegawai dalam melakukan pekerjaan, sehingga akan terbentuk tertib administrasi pelayanan bidang pertanahan. Jadi, bidang-bidang tanah yang sudah

terdaftar bisa menjadi data digital dan konek online. Data tersebut tidak hanya dilihat oleh kantor pertanahan kota Padang saja tetapi kantor pusat yang ada di Jakarta juga bisa melihat data itu dan menilai kualitas data yang dimasukkan. Masyarakat tidak bisa meakses aplikasi tersebut karena aplikasi ini memiliki ID dan Password, jadi hanya pegawai yang memiliki ID dan Password yang bisa meaksesnya.”

Dasar pelaksanaan aplikasi Geo KKP adalah Surat edaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 5/SE-100/2015 yang mengatur terkait penggunaan aplikasi geospasial komputerisasi kantor pertanahan. Dasar lain adalah pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 23 Tahun pembentukan kantor layanan pertanahan bersama dan perlimpahan kewenangan pengesahan catatan pada buku tanah elektronik yang tervalidasi dan penandatanganan sertifikat hak atas tanah dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah tertentu pada kantor layanan pertanahan bersama terintegrasi. Setelah penerapan sistem aplikasi Geo KKP, semua hal yang berkaitan dengan pelayanan administrasi dilakukan dengan menggunakan aplikasi Geo KKP, antaranya pendaftaran tanah, peta pendaftaran tanah, dan sertifikat hak atas tanah. Hingga saat ini sistem tersebut masih digunakan dalam hal fungsional.

Berdasarkan observasi yang sudah peneliti lakukan ada beberapa permasalahan yang terlihat. Permasalahan pertama yang terlihat adalah pelayanan publik yang kurang baik. Ini dapat kita lihat buruknya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam hal pengurusan pendaftaran tanah ataupun pembuatan sertifikat hak atas tanah. Banyaknya ibu-ibu yang saya temui merasa kurang diperhatikan dalam pengurusan serifikat tanah dikantor BPN Kota Padang ini karena prosedur yang berbelit-belit yang tergolong

lama. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan catur tertib administrasi pertanahan dimana mempercepat proses pelayanan yang menyangkut urusan pertanahan.

Selain itu, ini juga tidak sesuai dengan manfaat yang diperoleh dari aplikasi Geo KKP, yang dimana sistem ini mempermudah pegawai dalam menginput data-data yang berkenaan dengan pendaftaran tanah dan pembuatan sertifikat tanah. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti bersama ibu M (Inisial) salah satu masyarakat yang mengurus pembuatan sertifikat tanah di BPN kota padang :

“saya sedang mengurus sertifikat tanah dan sampai sekarang belum selesai, pegawai disini selalu mencari alasan baik itu syarat yang kurang lengkap, padahal syarat yang saya berikan sudah sesuai. sehingga membuat saya harus bolak-balik dari rumah ke kantor dan itu membutuhkan biaya”

Persoalan berikutnya yang peneliti temui adalah ketidaksesuaian dalam penggunaan aplikasi geospasial komputerisasi kantor pertanahan, dimana kurangnya nya transparansi pegawai kepada masyarakat terkait pelayanan yang berbasis online ini. Masyarakat tidak bisa mengakses dan melihat kembali data-data yang telah dimasukkan kedalam aplikasi GeoKKP. Karena aplikasi ini hanya dibuat untuk pegawai. Seharusnya, aplikasi Geo KKP ini tidak hanya untuk pegawai tetapi masyarakat juga bisa mengakses nya. Sehingga, tertib administrasi dalam bidang pertanahan akan terwujud. Secara operasional, manfaat aplikasi geospasial komputerisasi kantor pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kota Padang belum memberikan manfaat tingkat kepuasan masyarakat dalam mengakses informasi.

Hal ini dibuktikan bahwa masyarakat tidak bisa mengakses aplikasi tersebut. Ini tidak sesuai dengan surat edaran BPN RI yang mengatakan bahwa untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan pertanahan. Selain itu, kurang efisiensinya waktu dalam melakukan pelayanan juga menjadi persoalan, ini terlihat ketika pegawai memberikan pelayanan yang lambat kepada masyarakat. Seharusnya aplikasi ini membantu mempercepat proses pelayanan karena aplikasi ini berbasis digital yang dapat mempermudah pelayanan dan menghemat waktu.

Persoalan berikutnya yang peneliti temukan adalah kurangnya pemahaman pegawai dalam mengoperasikan sistem aplikasi Geo KKP. Ini terlihat masih banyaknya data yang dimasukkan kurang valid dan tidak sesuai seperti No. ganda, sehingga menimbulkan persoalan di *out put* atau hasil akhir. Para pegawai tersebut belum pernah mendapatkan sosialisasi atau pelatihan teknis secara maksimal dari pembuat sistem tersebut. Hal ini disadari karena mereka hanya belajar secara otodidak atau belajar dari rekan yang lebih paham. Tentunya hal ini juga dapat menimbulkan berbagai persoalan baik dari penggunaan sistem bahkan hingga penentuan hasil atau output dari proses yang dilakukan. Sehingga, proses penginputan data menjadi lama karena kesalahan pegawai dalam melakukan pekerjaan. Seharusnya, sebelum diterapkan aplikasi Geo KKP ini, pegawai harus diberikan pelatihan teknis dan sosialisasi terlebih untuk mengurangi kesalahan saat penginputan data. Selama ini pegawai bekerja sesuai pengetahuan yang di dapatkan dari orang-orang sebelumnya, sehingga ketika

ada kendala atau masalah ia cenderung mengambil keputusan yang di diskusikan dengan atasan.

Persoalan berikutnya yang peneliti temui adalah adalah jaringan internet yang kurang stabil. Dalam hal ini pegawai sering kali kesulitan dalam menginput data karena jaringan sering hilang timbul. Ini membuat data yang sudah dimasukkan ketika jaringan hilang akan membuat data tiba-tiba hilang dan harus mulai lagi dari awal penginputan. Sehingga penginputan data menjadi tertunda dan harus menunggu jaringan stabil seperti semula, ini membuat pekerjaan menjadi lama dan rumit. Seharusnya, pihak kantor harus menyiapkan terlebih dulu apa-apa saja yang dibutuhkan pada saat penginputan data, misalnya memasang sambungan *Wifi* di area kantor.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Sistem Geospasial Komputerisasi Dalam Upaya Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang**”

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat diidentifikasi tiga masalah yaitu :

- 1) Pelayanan publik yang belum maksimal
- 2) Kurangnya transparansi pegawai kepada masyarakat terkait kevaliditan data
- 3) Aplikasi Geo KKP hanya bisa diakses oleh pegawai bidang infrastruktur yang memiliki *ID* dan *Password*

- 4) Sarana dan prasarana pada kantor pertanahan masih belum memadai
- 5) Kurangnya sumber daya manusia terkait keterampilan dan kemampuan pegawai dalam penggunaan aplikasi Geo KKP
- 6) Kurangnya sosialisasi dan pelatihan teknis kepada pegawai terkait penggunaan sistem GeoKKP.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, penulis membatasi masalah pada bagaimana Implementasi Sistem Geospasial Komputerisasi Dalam Upaya Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka rumusan masalah dan penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Implementasi Sistem Geospasial Komputerisasi Dalam Upaya Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang?
2. Apa Saja kah kendala yang ditemui dalam implementasi Sistem Geospasial Komputerisasi Dalam Upaya Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang?
3. Upaya apa kah yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi sistem Geospasial Komputerisasi dalam upaya mewujudkan tertib administrasi pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang?

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Implementasi Sistem Geospasial Komputerisasi Dalam Upaya Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang.
2. Mengetahui Apa Saja kendala yang ditemui dalam implementasi Sistem Geospasial Komputerisasi Dalam Upaya Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang.
3. Mengetahui Upaya apa yang dilakukan untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan melalui sistem Geospasial Komputerisasi Kantor Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang.

F. Manfaat penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian yang saya lakukan adalah mampu memperkaya konsep-konsep tentang implementasi Sistem Informasi Manajemen dan juga Administrasi pertanahan. Konsep tersebut merupakan konsep yang dipelajari pada studi Administrasi Publik.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Kantor Pertanahan Nasional Kota Padang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan masukan terhadap Implementasi Sistem Geospasial Komputerisasi Dalam Upaya

Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang.

- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat bermanfaat dan membantu masyarakat dalam melakukan pelayanan online.
- c. Bagi peneliti, secara akademis dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan peneliti dalam menganalisa permasalahan yang terjadi dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi serta mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.